

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Jika dilihat sistem kelembagaan pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat dalam memperjuangkan hak adat maupun hak politik orang asli Papua dalam membangun pemerintah daerah Papua sangat di apresiasi. Semenjak terbentuknya MRP banyak sekali persoalan yang dihadapi baik persoalan kepetingan internal di daerah Papua, nasional bahkan internasional juga ikut campur dalam persoalan ekologi politik yang ada di Papua. Karena harus kita menyadari bahwa Papua merupakan salah daerah yang memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap sumber APBN Negara Republik Indonesia.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga adat MRP Papua Barat sangat berperan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di tanah Papua. Hal ini kita dapat lihat dari elemen regulatif, normatif, dan kultural-kognitif yang berlaku di Papua selama ini. Adapaun ketiga elemen itu bisa dilihat sebagai berikut di bawah ini:

- a. Secara regulatif dalam penelitian ini lembaga adat MRP Papua Barat sangat maksimal dan terlaksana dengan baik dalam

merealisasikan Peraturan Pemerintah Tentang Nomor 54 Tahun 2004 tentang majlis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 165). Hal ini bisa dilihat dalam penemuan penelitian ini bahwa lembaga adat yang memperjuangkan hak asli Papua mampu berkontribusi dengan baik. Adapun yang telah dilakukan oleh MRP selama ini diantaranya adalah melakukan rekonsiliasi terhadap hak-hak asli orang Papua serta mendorong adanya Perdasus dan mengawal pembangunan di Papua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara regulative kelembagaan MRP di Papua masih terlaksana.

- b. Kemudian secara Normatif dalam peneliti ini, membuktikan masih berlaku. Hal ini dibuktikan dengan nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan masyarakat asli Papua, dengan mengembalikan Kepemimpinan Tradisional, Penguatan Kelembagaan Adat, dan Keteguhan nilai-nilai budaya Papua. Dikatakan berjalan peran lembaga MRP dari element Kultural-Kognitif dalam tata kelola pemerintah yang baik dapat di buktikan dengan program Revitalisasi, Rekonstruksi, Reposisi peran Kelembagaan Masyarakat Adat (R3LMA). Dalam Good Governance sendiri di buktikan dengan Kerjasamanya MRP Papua barat dengan

Pemerintah Provinsi hingga pemerintah Pusat yang dapat menghasilkan Perdasus.

- c. Secara Kultural Kognitif dalam penelitian ini membuktikan bahwa nilai-nilai yang adat asli Papua masih di pertahankan. Hal ini dibuktikan dengan memprioritaskan agenda rekonsiliasi yang salah satu isinya pemulihan terhadap para leluhur orang asli Papua (suku-suku asli Papua) hingga kegenerasi pemuda sekarang dengan tujuan terwujudnya marga dari setiap suku-suku dan wilayah budaya sesama suku asli Papua yang hidup berdampingan. Selain itu secara hat atas masyarakat Hukum Adat juga masih berlaku sampai sekarang.

VI.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah Lembaga MRP Papua Barat selaku lembaga adat asli orang Papua di harapkan agar mampu berkerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya. Katakana saja seperti KPK atau BPK RI sehingga dengan anggaran yang dikelola oleh pemerintah di Papua baik eksekutif maupun legislatif mampu mengjudkan lembaga yang bebas dari KKN. Sehingga kasus korupsi yang terjadi pada ketua DPR Papua Barat tidak terulang lagi. Karena secara psikologis akan berdampak pada lembaga adat yang mengsulkannya melalui MRP. Oleh karena itu kehadiran dari MRP

Papua Barat di harapkan mampu mendorong pemerintah yang transparansi hingga terwujudnya good governance pada setiap element.